

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN  
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :  
Tri Wahyuni  
NIM E.0004051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN  
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA**

**Disusun Oleh :**

**TRI WAHYUNI**

**NIM : E. 0004051**

**Disetujui Untuk Dipertahankan**

**Dosen Pembimbing**

**Edy Herdyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 131 471 194**

## **PENGESAHAN PENGUJI**

**PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)  
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN  
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA**

**Disusun oleh :  
TRI WAHYUNI  
NIM : E. 0004051**

**Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada :**

**Hari : Selasa  
Tanggal : 15 April 2008**

### **TIM PENGUJI**

1. \_\_\_\_\_ : Bambang Santosa, S.H., M.Hum.  
Ketua

2. \_\_\_\_\_ : Kristiyadi, S.H., M.Hum.  
Sekretaris

3. \_\_\_\_\_ : Edy Herdyanto, S.H., M.H.  
Anggota

**Mengetahui :  
Dekan,**

**Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 570 154**

## **ABSTRAK**

**TRI WAHYUNI, E.0004051, TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). 2008.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Surakarta, dan juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Surakarta serta upaya-upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di RUPBASAN Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Kepala Rupbasan yang secara langsung menangani serta mengelola Rupbasan dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif, dimana data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Sedangkan sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan yaitu meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran dan penghapusan serta pelaporan. Dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Surakarta masih mengalami kendala-kendala yang meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Surakarta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Bambang Joko Sudibyo, S.H. Selaku Pembimbing Akademik yang tidak pernah bosan memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Skripsi dan Ketua Bagian Hukum Acara yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hendrat Puryanto, S.H., M.Si., Selaku Kepala RUPBASAN Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, serta kepada seluruh staff yang telah banyak membantu memperlancar penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

6. Ayah dan Ibu yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik materiil maupun spiritual.
7. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seseorang yang sempat mengisi hari-hariku disaat sedih dan bahagiaku. I hope you happy with your choice.
9. Sahabatku Heni dan Yuli, terima kasih untuk kasih sayang dan perhatiannya selama ini.
10. Tigor, Tri, Budi, Samsul, Neny, Rika you are my best friend always and forever. Semoga kalian tetap menjadi sahabat terbaikku.
11. Sahabatku Maya yang slalu setia mendengarkan curhatku dan membuat hidupku jadi lebih hidup.
12. Toya (tiyip) dan Nourish (tarwo) kucing-kucingku tersayang yang telah mengisi hari-hariku penuh dengan canda tawa.
13. Teman-temanku SMA VISKA : Bulan, Andri, Nurul, Gita, Hesti, Fajar terima kasih untuk supportnya...
14. Teman-temanku Lia, Dastin, Heri, Agung, Grace, Mbak Shinta dan semua teman-teman angkatan 04 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
15. Teman-teman magangku Gana, Fitri, Chater, Neny, Maya, Ridwan, Jack, Ananto, Mas Hendra yang menjadikan magang terheboh dan tak terlupakan.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dengan segenap kerelaannya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Surakarta, April 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	1
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Metode Penelitian .....	5
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
B. Kerangka Teori .....	11
1. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana .....	11
a. Penyelidikan Perkara Pidana .....	11
b. Penyidikan Perkara Pidana .....	18
2. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian .....	27
a. Alat Bukti .....	27
b. Sistem Pembuktian .....	36
3. Tinjauan Tentang Barang Bukti .....	40
a. Pengertian Barang Bukti .....	40
b. Hubungan Antara Barang Bukti dengan Alat Bukti .....	41
4. Tinjauan Tentang Penyitaan Barang Bukti .....	43
a. Pengertian Penyitaan .....	43

b. Pengertian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara .....	44
c. Benda-benda Yang Dapat Disita .....	45
5. Tinjauan Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) .....	47
C. Kerangka Pemikiran .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
A. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan Surakarta .....	51
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya .....	83
1. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta .....	83
2. Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala- Kendala Tersebut .....	85
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	88
A. Simpulan .....	88
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (*Herziening*) dan pelaksanaan putusan.

Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan.

Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Di wilayah Surakarta terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya Rupbasan dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitra masyarakat umum Rupbasan belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan.

Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi. Pendirian Rupbasan didasari oleh Pasal 44

ayat (1) KUHAP dan juga PP No. 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Sehubungan dengan apa yang disebut RUPBASAN yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, pada kenyataannya belum jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaannya, perlu diketahui bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sehingga kemudian hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak. Menurut Anton.M.Moeliono, pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Anton.M.Moeliono, 1998: 534).

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya. Sehingga di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : “TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN

PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Surakarta.
  - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Surakarta serta upaya penyelesaiannya.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum dan mengembangkan daya pemikiran penulis dalam lingkungan masyarakat.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Dapat sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian diatas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1984:10).

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia (Burhan Ashofa, 2004: 20-21).

## **4. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jln. Ir. Sutami No. 7 Surakarta.

## **5. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **6. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka sumber data yang dipakai adalah :

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data yang memberikan penjelasan tentang data-data empiris dan data-data tersebut terkait dengan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang diteliti oleh penulis seperti Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Surakarta, Kepala Rupbasan sebagai penanggung jawabnya.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data ini berasal dari literatur, referensi-referensi, dokumen-dokumen, buku-buku, makalah dan dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

**8. Teknik Analisa Data**

Menurut Lexy J. Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2001: 103).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*interaktive model of analysis*). Menurut HB. Soetopo teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari tiga komponen analisis yaitu (HB. Soetopo, 2002: 96) :

a. Reduksi Data



Reduksi data merupakan proses penyelesaian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis (*fieldnote*).

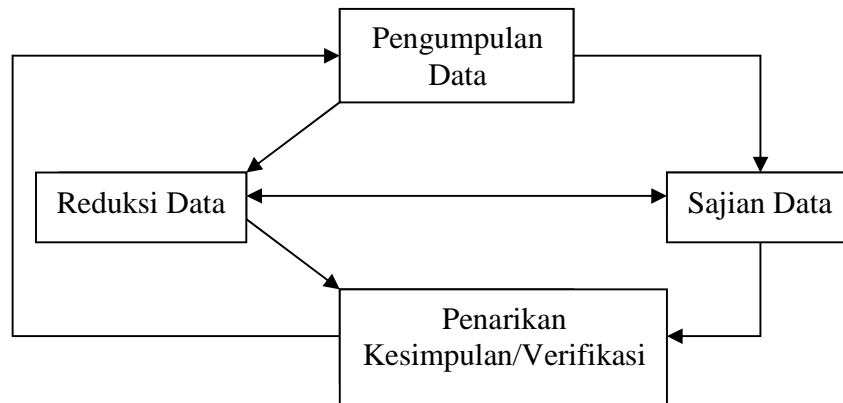
b. Penyajian Data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data.

Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) yaitu sebagai berikut :



## **F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar dalam penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum (Skripsi) ini adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan pemahaman terhadap isi penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu : tinjauan tentang penyelidikan perkara pidana dan penyidikan perkara pidana, tinjauan tentang alat bukti dan sistem pembuktian, tinjauan tentang barang bukti, tinjauan tentang

penyitaan barang bukti, tinjauan tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan kerangka pemikiran penulisan hukum (Skripsi).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta beserta upaya-upaya penyelesaiannya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi simpulan-simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana**

##### **a. Penyelidikan Perkara Pidana**

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan diatas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan dan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang “Praperadilan”. Karena sebagaimana digariskan KUHAP, memberi hak kepada

tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, dan barang bukti agar memadai untuk dilanjutkan penyidikan .

Siapa berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan (M. Yahya Harahap, 2000: 103).

Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi atau pejabat lain.

## **1) Fungsi dan Wewenang Penyelidik**

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi.

### **a) Fungsi dan Wewenang Berdasar Hukum**

Ini diatur pada Pasal 5 KUHAP. Berdasar ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyelidik :

1. Menerima Laporan atau Pengaduan

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti
3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai
4. Tindakan Lain Menurut Hukum

**b) Kewenangan Berdasar Perintah Penyidik**

Kewajiban dan wewenang ini bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik, berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penyelidik dapat bertindak melakukan segera apa yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik. Hal ini logis dan realistis, demi untuk segera dapat menangani dengan baik dan sempurna tugas penyelidikan. Pemberian wewenang yang demikian pada keadaan tertangkap tangan, efektif, dan efisien (M. Yahya Harahap, 2000: 107-108).

**c) Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan**

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis” . Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi

untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut (M. Yahya Harahap, 2000: 108).

## **2) Tahap Penyelidikan**

### **a) Kapan Penyelidikan Dimulai**

Menurut KUHAP, penyelidikan diintrodusir dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas (Moch. Faisal Salam, 2001: 31).

Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi dan data-data yang diperoleh.

Sedangkan Informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dapat diperoleh melalui :

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, sumber tersebut dapat berupa orang, tulisan dalam mass media, instansi/perusahaan dan sebagainya.

Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyelidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.

Dalam Pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana, hal ini merupakan suatu pertimbangan untuk melakukan penyelidikan.

**b) Tujuan Penyelidikan**

Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk :

1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
2. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
3. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Untuk mengadakan penyelidikan maka penyelidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bila penyelidikan kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian



bahwa apabila penyelidikan telah selesai, maka Penyidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu digeledah, barang bukti yang diamankan atau sita.

**c) Sasaran Penyelidikan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditentukan sasaran penyelidikan yaitu :

1. Orang yang telah melakukan tindak pidana.
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

**d) Cara Penyelidikan**

Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu :

1. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.

Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka apabila keterangan-keterangan/data-data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk mendapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

2. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Apabila penyelidikan dilakukan secara tertutup, penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. Untuk mengadakan penyelidikan secara tertutup maka

penyidik terlebih dahulu menguasai teknik penyelidikan secara tertutup itu.

**e) Penyelidikan**

Agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana, maka sebelum melakukan kegiatan penyelidikan, terlebih dahulu disusun suatu rencana penyelidikan. Semua kegiatan selanjutnya harus mengacu kepada rencana yang telah disusun tersebut agar terarah dan terkendali dengan baik.

Di dalam KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang (Moch. Faisal Salam, 2001:35) :

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat dll).
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
4. Petugas pelaksana.
5. Batas waktu kegiatan.

**f) Laporan Hasil Penyelidikan**

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan

tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat :

1. Sumber data/keterangan.
2. Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
3. Barang bukti.
4. Analisa.
5. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
6. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya.

**b. Penyidikan Perkara Pidana**

Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.

6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

1) **Pejabat Penyidik**

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik yaitu :

a) **Pejabat Penyidik Polri**

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Dari segi deferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, yaitu PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik

diatur dalam Bab II. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat dilihat uraian berikut.

**(1) Pejabat Penyidik Penuh**

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- Atau yang berpangkat bintang di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

**(2) Penyidik Pembantu**

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing (M.Yahya Harahap, 2000:111-112).

**b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang

sebagai penyidik. Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :
  - “koordinasi” penyidik Polri, dan
  - di bawah pengawasan” penyidik Polri”
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

## **2) Diketahui Terjadinya Delik**

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut (Andi Hamzah, 2002: 119) :

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP).

2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP).
3. Karena Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini.

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
4. Tertangkap kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Mengenai pemahaman delik tertangkap tangan ini KUHAP kurang jelas mengaturnya. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa penahanan itu dilakukan tanpa surat perintah. Ketentuan tersebut tambah meragukan kita apakah penangkap itu dapat diartikan siapa saja.

Yang diatur dalam KUHAP mengenai delik tertangkap tangan ialah mengenai penggeledahan, diatur dalam Pasal 35 larangan memasuki ruangan MPR, DPR, DPRD dimana sedang berlangsung sidang, tempat dimana sedang berlangsung ibadah, dan ruangan dimana sedang berlangsung sidang pengadilan, kecuali dalam hal delik tertangkap tangan.

Begitu pula penyitaan surat dan lain-lain yang pengangkutan dan pengirimannya melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi dalam hal delik tertangkap tangan diperbolehkan (Pasal 41).

Perluasan pengertian delik tertangkap tangan sampai meliputi beberapa hari sesudah terjadinya delik (barang bukti ada dalam tangan tersangka), menimbulkan keberatan-keberatan karena hal itu akan mengurangi hak asasi seseorang.

### **3) Pemeriksaan di Tempat Kejadian**

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Dalam Pasal 7 ayat (1) butir b ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat Polri) mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu mengatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang.

### **4) Pemanggilan Terhadap Tersangka dan Saksi**



Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir g yaitu bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi” (Andi Hamzah, 2002: 125).

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap :

- Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana;

Untuk pemanggilan tersangka, harus diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Berdasar ketentuan ini, seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan”. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang (M. Yahya Harahap, 2000: 125).

- Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, harus:

- seseorang yang mendengar sendiri,
- melihat sendiri,
- mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan
- orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

## **5) Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan**

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

### **a) Pemeriksaan Terhadap Tersangka**

Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain:

- (1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dan dengan bentuk apapun juga.
- (2) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka.

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.

### **b) Pemeriksaan Terhadap Saksi**

Tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapa pun. Hal ini serupa dengan yang digariskan kepada tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1).
- (2) Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ke

tempat kediamannya. Hal seperti ini ditempuh oleh penyidik, apabila saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik, disebabkan alasan yang patut dan wajar.

- (3) Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan “dapat” didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal kediaman saksi (Pasal 119).
- (4) Saksi diperiksa tanpa sumpah.
- (5) Saksi diperiksa sendiri-sendiri
- (6) Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

**c) Pemeriksaan Terhadap Ahli**

Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu” untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang yang memiliki “keahlian khusus”. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi dapat “terungkap lebih terang”.

**(1) Keterangan Langsung di Hadapan Penyidik**

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan “langsung” dihadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

- (a) Sifat keterangan yang diberikan menurut “pengetahuan” yang khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- (b) Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucapkan “sumpah” atau “janji”.
- (c) Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia.

## (2) Bentuk Keterangan Tertulis

Tata cara yang ditempuh penyidik mendapat keterangan tertulis seorang ahli seperti yang diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

- (a) Dalam hal penyidikan mengenai seorang korban luka, keracunan, ataupun kematian yang diduga sebagai akibat dari suatu peristiwa pidana maka demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan tertulis kepada ahli.
- (b) Pengajuan keterangan yang dimaksud diajukan kepada “ahli kedokteran kehakiman” atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (c) Cara meminta keterangan kepada ahli dengan “tertulis”. Dalam surat permintaan keterangan, penyidik menyebutkan dengan tegas pemeriksaan apa yang dikehendaki penyidik kepada ahli. Dari permintaan itu ahli melakukan pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, ataupun pemeriksaan bedah mayat.

## **2. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian**

### **a. Alat Bukti**

Alat Bukti adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan (Bambang Waluyo, 1996: 3).

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned. Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental (Andi Hamzah, 2002: 254).

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah :

1) Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut (Andi Hamzah, 2002: 256) :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut diatas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi...” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif (Andi Hamzah, 2002: 258).

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut :

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari” (ayat (1) ).

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (ayat (2) ).

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

“keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (Andi Hamzah, 2002: 259).

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan: “ Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, berpendapat sebagai berikut :

“....Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian ini tidak selalu disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal

pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa....” (Andi Hamzah, 2002: 262).

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ini dapat dibandingkan dengan Pasal 300 ayat (1) HIR dahulu yang mengatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain.

Menurut D. Simons dalam Andi Hamzah, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian juga ajaran Hoge Raad bahwa dapat diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (*bestanddeel*) delik dan tidak bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) ned. Sv. (Andi Hamzah, 2002: 265).

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi, hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah” (Andi Hamzah, 2002: 267).



Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam acara pemeriksaan cepat.

## 2) Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige*)

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. Sv. dan hukum acara pidana modern di banyak negeri.

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat (3)), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: “dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji...” Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan : “ Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi

mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 2002: 268).

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP).

### 3) Alat Bukti Surat

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti, maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di situ antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam HIR dan Ned. Sv. Yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat. Tetapi dalam Ned. Sv yang baru tidak lagi diatur hal yang demikian. Kepada hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.

Menurut Andi Hamzah, karena KUHAP juga tidak mengatur hal yang demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akta *autentik* yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana (Andi Hamzah, 2002: 271).

#### 4) Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Dalam penjelasan seluruh pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan Pasal 310 HIR dahulu, yang dipandang kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa. Menurut pendapat Andi Hamzah, pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, seperti halnya dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. Sv yang baru (Andi Hamzah, 2002: 272).

Jika kita perhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen warneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

#### 5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1944. NJ ‘44/’45 No. 589.

Suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

**b. Sistem Pembuktian**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya seseorang yang didakwa berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, diantaranya adalah sebagai berikut :

**(1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif**

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons dalam Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana (Andi Hamzah, 2002: 247).

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat (Andi Hamzah, 2002: 247).

## (2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan keyakinan hati nuraninya

sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan (Andi Hamzah, 2002: 248).

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu (*conviction intime*).

(3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Menurut teori ini, hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang ia pergunakan.

(4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang , kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Sebenarnya sebelum diberlakukannya KUHP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut.

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut *alat* pembuktian bukan *alat-alat pembuktian*, atau seperti dalam Pasal 183 KUHP disebut *dua alat bukti*.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan berdasarkan kepada pembuktian berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada



keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang (Andi Hamzah, 2002: 252).

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, jaganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan (Andi Hamzah, 2002: 253).

### **3. Tinjauan Tentang Barang Bukti**

#### **a. Pengertian Barang Bukti**

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah

tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan (sebagaimana dikutip oleh Ratna Nurul Afiah dalam buku Barang Bukti dalam proses pidana hal.14 dari Moeljatno, Hukum acara pidana seksi kepidanaan fakultas hukum UGM hal.132).

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.

Apakah yang dimaksud dengan barang bukti itu? Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, 1989: 14).

Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut:

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik” (Ratna Nurul Afiah, 1989: 15).

Disamping itu adapula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Ratna Nurul Afiah, 1989: 15).

Pelaku dan perbuatannya serta barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHAP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

**b. Hubungan Antara Barang Bukti dengan Alat Bukti**

Secara limitatif alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya berkaitan dengan alat bukti dalam Pasal 181 KUHAP mengatur pemeriksaan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang ini.

2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Dengan adanya kedua pasal tersebut maka barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat.

Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi (Ratna Nurul Afiah, 1989: 20-21) :

- 1) Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
- 2) Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Hal ini disebabkan karena dalam KUHAP Pasal 188 ayat (2) tidak dicantumkan lagi “ Pemeriksaan atau pengamatan sendiri oleh hakim” sehingga barang bukti tidak lagi menjadi petunjuk.

#### **4. Tinjauan Tentang Penyitaan Barang Bukti**

##### **a. Pengertian Penyitaan**

Dalam uraian dimuka telah dapat dijelaskan bahwa barang bukti dapat diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, pemeriksaan surat dan penyitaan atau diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, dan dapat pula berupa barang temuan (Ratna Nurul Afiah, 1989: 69).

Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap benda yang tersangkut perkara pidana itu adalah menahannya untuk sementara guna

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan sidang peradilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan”, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*In Beslagneming*” (Ratna Nurul Afiah: 69).

Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa (Ratna Nurul Afiah, 1989: 69-70) :

- (1) Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “.....  
Serangkaian tindakan penyidik untuk.....”
- (2) Penyitaan bersifat pengambil alihan atau penyimpanan dibawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
- (3) Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
- (4) Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Disini terdapat kekurangan ketentuan KUHAP karena sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned.Sv (Hukum Acara Pidana Belanda) (Ratna Nurul Afiah, 1989: 69-70).

Menurut Pasal 134 Hukum Acara Pidana Belanda definisi penyitaan adalah : “Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana (Ratna Nurul afiah, 1989:70).

Setiap penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam pelaksanaannya penyitaan dapat dilakukan oleh :

- a) Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b point 1 KUHAP)
- b) Penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP)
- c) Penyidik pembantu (Pasal 11 KUHAP)

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan polisi, berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Laporan Hasil Penyidikan dan atau Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atau Berita Acara Pemeriksaan tersangka, dan penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda-benda lain dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan.

**b. Pengertian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara**

Mengenai benda-benda yang disimpan di Rupbasan diatur dalam Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa didalam Rupbasan ditempatkan benda yang disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (Ratna Nurul Afiah, 1989: 106).

Selanjutnya yang dimaksud benda sitaan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah benda yang disita penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Sedangkan yang dimaksud barang rampasan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara :

(a) Dimusnahkan :

1. Dibakar sampai habis.
2. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
3. Ditanam didalam tanah.
4. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

(b) Dilelang untuk negara.

(c) Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.

(d) Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

**c. Benda-benda Yang Dapat Disita**

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” dikenal “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” dikenal dengan” mengenai mana delik dilakukan”. Sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi :

- (1) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (disebut juga *instrumenta delicti*).
- (2) Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga *corpora delicti*).
- (3) Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.
- (4) Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli radio, dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita meliputi :

- (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi.
- (b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.
- (c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka.
- (d) Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah.
- (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.
- (f) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

##### **5. Tinjauan Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)**

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa



kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan (M. Yahya Harahap, 2000: 277).

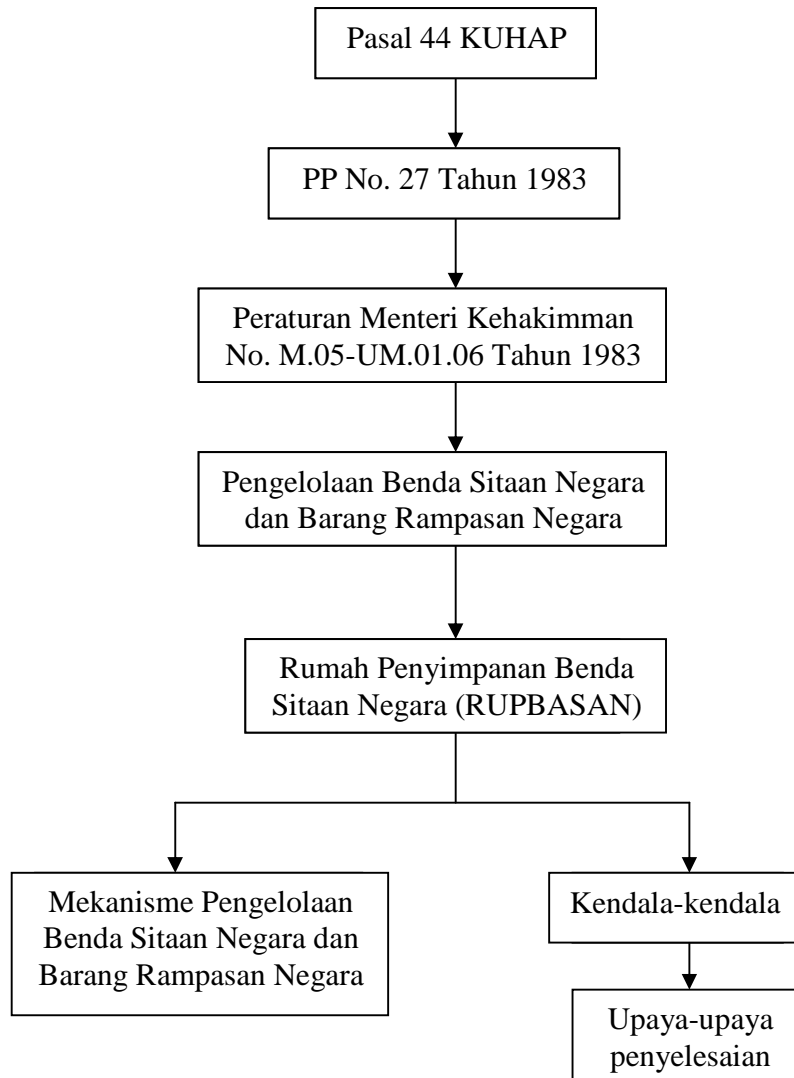
Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah memberi ketentuan- ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang (M. Yahya Harahap, 2000: 277).

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempat

yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri, dan di Bank Pemerintah. Dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Rupbasan itu berada, menurut Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983, di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri Kehakiman. Apabila dipandang perlu dapat membentuk rupbasan diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang rupbasan. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

## **B. Kerangka Pemikiran**



**Keterangan :**

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengelolaan benda sitaan

dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sehingga untuk merealisasikan peraturan tersebut didirikanlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Dalam menjalankan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan, perlu diketahui mengenai mekanisme-mekanisme pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, dimana dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern sehingga diperlukan upaya-upaya penyelesaiannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta**

Rupbasan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan wahana yang penting dalam penegakan hukum. Hal ini tidak lepas dari peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan. Sebab pengelolaan benda sitaan sangat terkait dengan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1986 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran

- a. Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Penempatan benda sitaan negara tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya.
- c. Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan tingkat pemeriksaan.
- d. Kepala RUPBASAN wajib memperhatikan penyimpanan benda sitaan negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negara yang berharga, cepat rusak/busuk atau berbahaya, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- e. Dalam hal benda sitaan negara yang dimaksud tidak mungkin untuk dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian, sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut.
- f. Dalam hal pemberian kuasa penyimpanan dimaksud tidak dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHP.
- g. Dalam penerimaan benda sitaan negara, petugas RUPBASAN wajib melakukan :
  - 1) Penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penerimaan, penyimpanan benda sitaan negara;

- 2) Pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan negara yang diterima, sesuai dengan berita acara penyitaan;
  - 3) Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan dan mutu benda sitaan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
  - 4) Pencatatan benda sitaan negara yang diterima ke dalam buku register, kemudian ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan.
- h. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud dilakukan dalam ruangan khusus dan harus menjaga agar benda sitaan negara tersebut tetap utuh (tidak menimbulkan kerusakan).
  - i. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas RUPBASAN yang mempunyai keahlian dalam menentukan mutu dan jumlah dari benda sitaan negara.
  - j. Dalam hal pada RUPBASAN tidak ada petugas ahli dimaksud, maka penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ahli atas permintaan kepala RUPBASAN.
  - k. Terhadap penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut harus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh petugas RUPBASAN dan petugas yang menyerahkan.
  - l. Dalam hal penaksiran/pemeriksaan dilakukan oleh seorang ahli, maka seorang ahli yang bersangkutan juga ikut menandatangani berita acara tersebut.
  - m. Benda sitaan negara yang akan disimpan, dicatat dalam buku register daftar benda sitaan negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan penggolongannya.
  - n. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut tentang buku register yang dimaksud dan buku register lain yang diperlukan.

## 2. Pemeliharaan dan Pengamanan

- a. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara.
- b. Sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud, Kepala RUPBASAN harus :
  - 1) Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan negara;
  - 2) Memperhatikan benda sitaan negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya :
    - a) Benda-benda yang berbahaya
    - b) Benda-benda yang berharga
    - c) Benda-benda yang memerlukan pengawetan.
  - 3) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan negara.
- c. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan negara.
- d. Sesuai tanggung jawab yang dimaksud, Kepala RUPBASAN harus :
  - 1) Menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian;
  - 2) Mencegah terjadi kebakaran atau banjir;
  - 3) Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya;
  - 4) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian atas benda sitaan negara.
- e. Apabila terjadi kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, maka dilakukan penyidikan sebagaimana mestinya.
- f. Apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan atau akibat kelalaian petugas RUPBASAN terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Setiap tindakan atau putusan yang akan diambil oleh Kepala RUPBASAN terhadap para petugas RUPBASAN yang terlibat dimaksud, harus terlebih



dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, kecuali apabila keadaan yang sangat mendesak perlu segera diambil tindakan.

### 3. Pengeluaran dan Pemusnahan

- a. Pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan penyidikan dan penuntutan, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari instansi yang menyita benda sitaan negara tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf a, petugas RUPBASAN harus :
  - 1) Meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara;
  - 2) Membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada instansi yang menyita;
  - 3) Mencatat lama peminjaman benda sitaan negara, dalam register yang tersedia.
- c. Surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan sidang pengadilan, harus sudah diterima oleh Kepala RUPBASAN selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum hari sidang.
- d. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf c, petugas RUPBASAN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (1), (2) dan (3) tersebut diatas.
- e. Pengeluaran benda sitaan negara untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak (Pasal 46 ayat (1) KUHAP) harus berdasarkan surat perintah/penetapan pengembalian dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam pelaksanaan pengeluaran yang dimaksud huruf e, petugas RUPBASAN harus :

- 1) Meneliti surat perintah/penetapan dari instansi yang menyita atau putusan pengadilan yang bersangkutan;
  - 2) Membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita;
  - 3) Mencatat dan mencoret benda sitaan negara tersebut dari daftar yang tersedia.
- g. Pengeluaran benda sitaan negara karena dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi, harus berdasarkan putusan pengadilan.
- h. Dalam hal benda sitaan negara dirampas untuk negara, petugas RUPBASAN harus :
- 1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
  - 2) Membuat berita acara serah terima apabila ditetapkan instansi tertentu untuk menerimanya;
  - 3) Mencatat dalam register yang tersedia.
- i. Dalam hal benda sitaan negara tersebut harus dimusnahkan atau dirusakkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak dapat digunakan lagi, petugas RUPBASAN harus :
- 1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
  - 2) Menyaksikan pemusnahan dan menandatangani berita acara pemusnahan;
  - 3) Mencatat dan mencoret dari daftar register yang tersedia.
- j. Terhadap benda sitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP, dapat dijual lelang oleh instansi yang menyita.
- k. Hasil lelang yang dimaksud dalam huruf j yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti, disimpan dalam RUPBASAN, dan didaftar dalam register yang tersedia.
- l. Terhadap benda sitaan negara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk

negara, dapat dijual lelang dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.

- m. Pelaksanaan lelang dimaksud huruf j dan huruf l harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan disaksikan oleh petugas RUPBASAN.
- n. Pengeluaran atau penghapusan benda sitaan negara dari daftar register, yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau karena bencana alam, dilakukan oleh suatu Panitia Khusus untuk itu.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2002 disebutkan bahwa pokok-pokok pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN mencakup :

1. Penerimaan

- a. Penerimaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN wajib didasarkan pada surat-surat yang sah;
- b. Penerimaan benda sitaan negara dan atau barang rampasan negara (Basan dan atau Baran ) dilakukan oleh petugas penerima;
- c. Petugas penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam, dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut;
- d. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan benda sitaan dan barang rampasan negara berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti;
- e. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan pemotretan ditempat mana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan;

- f. Setelah pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas peneliti, membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi hasil identifikasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan petugas penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara kepada petugas pendaftaran.

## 2. Penelitian dan Penilaian

- a. Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan negara dan barang rampasan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
- b. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti;
- c. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti;
- d. Berita acara serah terima ditandatangani, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan identifikasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

## 3. Pendaftaran

- a. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara penelitian benda sitaan dan barang rampasan negara dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan;
- b. Mencatat dan mendaftarkan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
- c. Setelah selesai dicatat dan didaftar petugas pendaftaran menyerahkan benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut kepada petugas penyimpanan.

## 4. Penyimpanan

- a. Benda sitaan dan barang rampasan negara yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat resiko dan jenisnya.
- b. Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah :
  - 1) Tingkat Penyidikan;
  - 2) Tingkat Penuntutan;
  - 3) Tingkat Pengadilan Negeri;
  - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding;
  - 5) Tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi.
- c. Penyimpanan berdasarkan tempat resiko ialah :
  - 1) Basan dan Baran Umum;
  - 2) Basan dan Baran Berharga;
  - 3) Basan dan Baran Berbahaya;
  - 4) Basan dan Baran terbuka dan cepat rusak.
- d. Penyimpanan berdasarkan jenisnya adalah :
  - 1) Kertas;
  - 2) Logam;
  - 3) Non logam;
  - 4) Bahan kimia dan obat-obatan terlarang;
  - 5) Peralatan listrik elektronik;
  - 6) Peralatan bermesin mekanik;
  - 7) Berbentuk gas;
  - 8) Alat-alat rumah tangga;
  - 9) Bahan makanan dan minuman;
  - 10) Tumbuh-tumbuhan atau tanaman;
  - 11) Hewan ternak;
  - 12) Rumah, bangunan gedung;
  - 13) Tanah dan;
  - 14) Kapal laut dan kapal udara.

- e. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak disimpan di RUPBASAN, dititipkan oleh Kepala RUPBASAN kepada instansi atau Badan Organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian.
- f. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke RUPBASAN, wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan.

#### 5. Pemeliharaan

- a. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara.
- b. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan dan ia senantiasa wajib :

- 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
- 2) Memperhatikan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang memerlukan pemeliharaan khusus.

Mencatat dan melaporkan kepada Kepala RUPBASAN apabila terjadi kerusakan atau penyusutan Basan dan atau Baran untuk diteruskan kepada instansi yang bersangkutan.

- c. Tugas Pemeliharaan :

- 1) Tugas pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana;
- 2) Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi benda sitaan dan barang rampasan negara agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya;

- d. Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN harus didasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara;

- e. Secara periodik diadakan Stock opname terhadap seluruh Basan dan Baran.

#### 6. Pemutasian

- a. Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi :
  - 1) mutasi administratif;
  - 2) mutasi fisik.
- b. Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara didasarkan pada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat pemeriksaan, yaitu :
  - 1) Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang menyita;
  - 2) Surat permintaan penuntut umum;
  - 3) Surat penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Dalam setiap pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara wajib dibuatkan berita acara sesuai dengan surat permintaan instansi yang berwenang untuk keperluan dan atau digunakan pada proses peradilan.

#### 7. Pengeluaran/Penghapusan

- a. Dasar pelaksanaannya pengeluaran/penghapusan :
  - 1) Surat putusan atau penetapan pengadilan;
  - 2) Surat perintah penyidik/penuntut umum;
  - 3) Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.
- b. Tugas pengeluaran :
  - 1) Pengeluaran sebelum adanya putusan pengadilan meliputi kegiatan:
    - a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
    - b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

- c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum;
  - d) Pengeluaran benda sitaan negara melalui tindakan jual lelang yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Basan yang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan tinggi; hasil lelang barang bukti tersebut berupa uang disimpan di RUPBASAN untuk dipakai sebagai barang bukti;
  - e) Pengeluaran benda sitaan negara atas permintaan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
- 2) Pengeluaran Basan dan Baran setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :
- a) Kembali kepada yang paling berhak;
  - b) Dirampas untuk kepentingan negara dengan cara dilelang, dimusnahkan dan atau diserahkan kepada instansi yang berkepentingan, berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Pengeluaran Basan dan Baran yang dilakukan setelah proses penghapusan. Pelaksanaan penghapusan Basan dan Baran berdasarkan atas usul Kepala RUPBASAN karena adanya :
- a) Kerusakan;
  - b) Penyusutan;
  - c) Kebakaran;
  - d) Bencana alam;
  - e) Pencurian;
  - f) Barang temuan;
  - g) Barang bukti tidak diambil.

#### 8. Penyelamatan dan Pengamanan

- a. Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN :



- 1) Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN berada pada Kepala RUPBASAN;
  - 2) Apabila Kepala RUPBASAN tidak berada ditempat, maka tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan berada pada Kepala Satuan Pengamanan RUPBASAN atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala RUPBASAN;
  - 3) Dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan RUPBASAN Kepala RUPBASAN dibantu oleh Kepala Satuan Pengamanan;
  - 4) Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keselamatan dan keamanan RUPBASAN;
  - 5) Dalam keadaan darurat setiap pegawai RUPBASAN wajib melaksanakan tugas penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN;
  - 6) Pada saat menjalankan tugas, petugas penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN dilengkapi senjata api dan sarana keamanan lainnya;
  - 7) Petugas RUPBASAN diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan tugas dan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas Pokok Penyelamatan dan Pengamanan RUPBASAN :
- 1) Menjaga agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, banjir atau karena adanya gangguan bencana alam lainnya;
  - 2) Melakukan pengamanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan;
  - 3) Memelihara, mengawasi dan menjaga barang-barang inventaris RUPBASAN;
  - 4) Melaksanakan administrasi keselamatan dan keamanan RUPBASAN.
- c. Sasaran Penyelamatan dan Pengamanan diarahkan pada RUPBASAN yang meliputi :
- 1) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
  - 2) Pegawai;

- 3) Bangunan dan perlengkapan;
  - 4) Aspek-aspek ketatalaksanaan;
  - 5) Lingkungan sosial atau masyarakat luar.
- d. Tugas Penyelamatan dan Pengamanan dalam proses pengelolaan Basan dan Baran :
- 1) Menjunjung keberhasilan proses pengelolaan Basan dan Baran;
  - 2) Melaksanakan pengelolaan meliputi proses penerimaan sampai pengeluaran Basan dan Baran;
  - 3) Penginderaan dini terhadap berbagai masalah yang terjadi di dalam maupun di luar RUPBASAN;
  - 4) Dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan diselenggarakan terpadu secara fungsional dengan instansi-instansi lain;
  - 5) Dalam melaksanakan tugas berkewajiban memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e. Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh petugas penyelamatan dan pengamanan :
- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan instansi penegak hukum lainnya;
  - 2) Dilarang menggunakan Basan dan Baran dengan alasan apapun;
  - 3) Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas;
  - 4) Dalam menjalankan tugas dilarang meninggalkan tempat tanpa izin dari Kepala Regu Penjagaan;
  - 5) Dalam melaksanakan tugas wajib mentaati aturan tentang penggunaan perlengkapan dinas meliputi :
    - a) Senjata api;
    - b) Sarana keamanan lainnya;
    - c) Pakaian dinas;
    - d) Kendaraan dinas;

e) Perumahan dinas.

## 9. Pelaporan

### a. Laporan Tertulis

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian semua kegiatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

### b. Pengeluaran Akhir

Pengeluaran akhir benda sitaan negara dan barang rampasan negara laporannya disampaikan pada instansi yang berkepentingan, tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

### c. Kejadian Luar Biasa

Dalam hal terjadi peristiwa yang luar biasa, segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkepentingan melalui telepon, kawat atau dengan cara lain dan kemudian segera disusul dengan laporan lengkap secara tertulis.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35. PK.03.10 Tahun 2002, selain memuat tentang petunjuk pelaksanaan juga memuat petunjuk teknis pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, disebutkan bahwa tujuan dari petunjuk teknis ini adalah agar pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara diseluruh unit RUPBASAN dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup yang ada pada petunjuk teknis ini adalah meliputi :

#### 1. Penerimaan

- a. Petugas penerima RUPBASAN menerima Basan Baran dari petugas yang mengantarkannya.
  - b. Petugas penerima memeriksa keabsahan salah satu diantara surat-surat sebagai berikut :
    - 1) Surat Perintah Penyitaan;
    - 2) Surat Izin Penyitaan/Penetapan;
    - 3) Berita Acara Penyitaan;
    - 4) Surat Pengantar dari Instansi yang berwenang Menandatangani;
    - 5) Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Bukti.
  - c. Terhadap Basan dan Baran yang tidak bergerak, Basan yang tidak disimpan di RUPBASAN, petugas penerima bersama-sama petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan, memeriksa surat-surat dan mencocokkannya melakukan pemotretan ditempat dimana Basan Baran berada dan membuat Berita Acara (Model BA.1) selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Penitipan (Model BA.8).
2. Penelitian dan Penilaian
- a. Cara meneliti Basan dan Baran oleh petugas peneliti disesuaikan dengan jenis barang bukti sebagaimana tercantum dalam JUKLAK.
  - b. Apabila di RUPBASAN tidak ada petugas peneliti ahli maka penelitian, pemeriksaan dan penaksiran dilakukan oleh tenaga ahli dari instansi lain atas permintaan Kepala RUPBASAN.
  - c. Dalam proses kerja ini dibuat Berita Acara :
    - 1) Berita Acara Penelitian, model BA.1.
    - 2) Berita Acara Serah Terima, model BA.2.
  - d. Berita Acara Penelitian ditandatangani oleh petugas peneliti, dibuat rangkap 4 (empat) :
    - 1) Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan;
    - 2) Lembar kedua untuk petugas yang menerima;

- 3) Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan;
  - 4) Lembar keempat untuk petugas peneliti/penilai.
- e. Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan diketahui oleh Kepala RUPBASAN atau pejabat struktural yang ditunjuk, dibuat rangkap 4 (empat) :
- 1) Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan;
  - 2) Lembar kedua untuk petugas pendaftaran;
  - 3) Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan dan pemeliharaan;
  - 4) Lembar keempat untuk petugas keselamatan dan pengamanan.
3. Pendaftaran
- a. Untuk mendaftar atau mencatat Basan Baran disediakan buku register daftar sebagai berikut :
- 1) Buku Register Basan Baran pada tingkat penyidikan, model RBB.1
  - 2) Buku Register Basan Baran pada tingkat penuntutan, model RBB.2
  - 3) Buku Register Basan Baran pada tingkat Pengadilan Negeri, model RBB.3
  - 4) Buku Register Basan Baran pada tingkat Pengadilan Tinggi, model RBB.4
  - 5) Buku Register Basan Baran pada tingkat Mahkamah Agung, model RBB.5
- b. Petugas pendaftaran mencatat Basan Baran dalam buku Register yang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengisi label yang ada pada tingkat barang bukti tersebut kemudian disegel.
- c. Isi label barang bukti adalah :
- 1) Nomor Register;
  - 2) Nomor Register Perkara;
  - 3) Nomor Berita Acara Penelitian;
  - 4) Nama pemilik tersangka/terdakwa;
  - 5) Tanggal penyimpanan;

6) Benda berupa.....

#### 4. Penyimpanan

- a. Petugas penyimpanan menerima Basan Baran yang sudah di label beserta lampirannya masing-masing lembar ke 3 (tiga) yaitu berupa :
  - 1) Berita Acara Penelitian (Model BA.1);
  - 2) Berita Acara Serah Terima (Model BA.2).
- b. Penyimpanan Basan Baran sesuai dengan letak tempat gudang sebagai berikut :
  - 1) Basan Baran Umum :
    - a) Ditempatkan dalam gudang yang idealnya, dilengkapi dengan sarana jalan yang memudahkan keluar masuknya barang dan petugas. Gudang harus selalu dalam kondisi tertutup tetapi cukup penerangan dan ventilasi.
    - b) Ditempatkan terpisah-pisah menurut jenisnya, sehingga memudahkan pengawasan, pemeriksaan dan pemeliharaan.
    - c) Tempat penyimpanan Basan Baran dalam gudang berupa rak-rak atau lemari-lemari kayu atau besi.
  - 2) Basan Baran Berharga :

Ditempatkan pada gudang dilengkapi dengan terali besi dan Basan Baran disimpan dalam lemari besi tahan api.
  - 3) Basan Baran Berbahaya :

Penempatannya khusus untuk menjamin keselamatan dilengkapi dengan alat pendingin udara dan pemadam kebakaran agar secepatnya bisa dipergunakan oleh petugas penjaga gudang. Letak gudangnya harus jauh dari pengaruh suhu yang tinggi.
  - 4) Basan Baran Terbuka :
    - a) Disimpan ditempat terbuka dalam arti tidak berdinding rapat atau tembok, tetapi terlindung diatasnya dengan atap genteng atau seng;

- b) Untuk memudahkan keluar masuknya barang penempatannya diatur dengan memperhatikan jarak antara barang yang satu dengan yang lainnya.

## 5. Pemeliharaan

### a. Tanggung Jawab Pemeliharaan :

- 1) Tanggung jawab pemeliharaan atas keutuhan Basan Baran ada pada Kepala RUPBASAN.
- 2) Pemeriksaan berkala atas pemeliharaan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu.

### b. Kelengkapan Pemeliharaan :

- 1) Buku pemeliharaan untuk mencatat kapan Basan Baran dipelihara, diberi model RBP.1.
- 2) Buku pemeriksaan untuk mencatat kapan dan siapa yang melakukan pemeriksaan Basan Baran baik berkala maupun sewaktu - waktu diberi model RBP.2.
- 3) Kartu pemeriksaan untuk mencatat kapan pemeriksaan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu dicatat dalam model KRT.2.

### c. Cara pemeliharaan Basan Baran sesuai dengan sifat barang bukti yang bersangkutan :

- 1) Basan Baran yang mengandung metal atau logam
  - a) Sifatnya mudah terjadi pengkaratan barang yang mengandung besi karatnya berwarna coklat, barang yang mengandung tembaga karatnya berwarna hijau, dan barang yang mengandung aluminium karatnya berwarna putih).
  - b) Sifatnya pengkaratan akan lebih cepat bila udara lembab, udara mengandung uap belerang, ditempatkan disekitar benda terdapat belerang atau Chlorida.
- c) Cara pemeliharaannya :

- (a) Diusahakan agar udara selalu kering.
  - (b) Jauhkan dari udara yang mengandung uap belerang dan asam atau garam-garam Chlorida.
- 2) Basan Baran yang tidak mengandung metal
- a) Barang Kertas
    - (1) Tanda-tanda kerusakannya :
      - (a) Terjadi perubahan warna;
      - (b) Lapuk dan rapuh;
      - (c) Berlubang-lubang.
    - (2) Penyebab kerusakannya :
      - (a) Sinar matahari yang langsung mengenai kertas;
      - (b) Jamur;
      - (c) Serangga;
      - (d) Udara lembab;
      - (e) Temperatur terlalu tinggi/panas yang kuat.
    - (3) Cara pemeliharaannya :
      - (a) Disimpan ditempat yang teduh tapi tidak lembab;
      - (b) Disimpan ditempat yang bersih;
      - (c) Disimpan ditempat yang temperaturnya sesuai dengan tingkat kebutuhan
  - b) Barang Kayu
    - (1) Tanda-tanda kerusakan :
      - (a) Nampak adanya pelapukan karena pengaruh air atau udara lembab;
      - (b) Tumbuh jamur;
      - (c) Gangguan serangga;
      - (d) Berlubang-lubang karena gangguan ulat dan kumbang;
      - (e) Kehilangan bahan perekat (untuk kayu lapis).
    - (2) Cara pemeliharaannya :



- (a) Disimpan ditempat kering dan jauh dari air;
- (b) Temperatur tempat penyimpanan harus stabil;
- (c) Cukup sinar matahari;
- (d) Disimpan pada tempat yang bersih.

c) Barang Tekstil

(1) Tanda-tanda kerusakannya :

- (a) Tumbuhnya jamur;
- (b) Perubahan warna pada tekstil;
- (c) Berkurang kekuatannya;
- (d) Terdapat lubang-lubang karena gigitan insek atau ngengat.

(2) Cara pemeliharaannya :

- (a) Disimpan pada udara yang kering (tidak lembab);
- (b) Temperatur tempat penyimpanan harus stabil;
- (c) Cukup sinar matahari;
- (d) Disimpan pada tempat yang bersih.

d) Barang Kulit

(1) Tanda-tanda kerusakan yang terjadi antara lain :

- (a) Tumbuhnya jamur;
- (b) Nampak kulit menjadi pecah-pecah, mudah menjadi robek (kekuatan berkurang).

(2) Cara pemeliharaannya :

- (a) Jauhkan dari sinar matahari yang berlebihan;
- (b) Usahakan temperatur yang sesuai dengan keperluan benda;
- (c) Jauhkan dari udara kering/panas, tetapi tidak lembab.

e) Karet Alam dan Sintetis

(1) Tanda-tanda kerusakannya antara lain :

- (a) Terdapat tanda pecah-pecah;
- (b) Adanya perubahan bentuk;
- (c) Berkurangnya tingkat elastisitasnya.

(2) Penyebab kerusakannya antara lain :

- (a) Udara panas;
- (b) Sinar matahari langsung;
- (c) Pengaruh minyak/gemuk;
- (d) Pengaruh tekanan atau benda berat.

(3) Cara pemeliharaan :

- (a) Disimpan ditempat kering dan tidak terlalu panas;
- (b) Terlindung dari sinar matahari;
- (c) Jauh dari minyak/gemuk;
- (d) Tidak ditumpuk dengan barang sejenisnya atau barang yang berat.

f) Barang Plastik

(1) Tanda-tanda kerusakan antara lain :

- (a) Berkurangnya kekuatan;
- (b) Terdapat retak-retak;
- (c) Kehilangan sifat transparansi;
- (d) Melengkung akibat panas atau tekanan.

(2) Penyebab kerusakan antara lain :

- (a) Pengaruh panas dari api;
- (b) Adanya tekanan yang cukup berat pada barang plastik;
- (c) Pengaruh temperatur yang tidak tetap.

(3) Cara pemeliharaannya :

- (a) Jauhkan dari panas api;
- (b) Tidak terkena tekanan dari barang lain yang berat;
- (c) Disimpan pada tempat tertentu dengan temperatur tetap sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g) Barang Gelas atau Kaca

(1) Tanda-tanda kerusakan antara lain :

- (a) Terdapat lapisan jamur atau lumut;

- (b) Tingkat cahaya yang berkurang atau menjadi kusam.
- (2) Penyebab kerusakan antara lain :
  - (a) Pengaruh udara lembab;
  - (b) Pengaruh sinar matahari langsung;
  - (c) Temperatur yang tidak tetap.
- (3) Cara pemeliharaannya antara lain :
  - (a) Disimpan ditempat yang kering (tidak lembab);
  - (b) Tidak terkena sinar matahari secara langsung;
  - (c) Disimpan pada tempat tertentu yang temperaturnya tetap;
  - (d) Jauhkan dari benda-benda keras.
- h) Macam-macam Semen Batu
  - (1) Tanda-tanda kerusakan antara lain :
    - (a) Semen berubah menjadi membatu;
    - (b) Daya rekatnya berkurang;
    - (c) Tidak cepat kering.
  - (2) Penyebabnya antara lain :
    - (a) Pengaruh udara lembab;
    - (b) Terkena air.
  - (3) Cara pemeliharaannya antara lain :
    - (a) Disimpan ditempat yang kering;
    - (b) Jauh dari pengaruh udara lembab;
    - (c) Jauh dari minyak/gemuk;
    - (d) Tidak ditumpuk dengan barang sejenisnya atau barang yang berat.
- 3) Kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak
  - a) Tanda-tanda kerusakan antara lain :
    - (1) Catnya rontok;
    - (2) Bagian-bagian yang mengkilat jadi berkarat;
    - (3) Ban kempes;

- (4) Kaca pecah-pecah atau retak;
- (5) Tengki bensin bocor;
- (6) Kabel terkelupas;
- (7) Mesin sukar dihidupkan;
- (8) Daya accu lemah;
- (9) Lampu, klakson mati.
- b) Cara pemeliharaannya :
  - (1) Dibersihkan badan dan mesinnya;
  - (2) Mesin dihidupkan tiap pagi selama 10 (sepuluh) menit;
  - (3) Periksa olie dan air, bila kurang harus ditambah/diganti;
  - (4) Tempatkan digedung terbuka dengan ban (roda) dilandasi dengan kayu.
- 4) Alat-alat bermotor listrik
  - a) Tanda-tanda kerusakan antara lain :
    - (1) Kabel-kabel terkelupas;
    - (2) Besi magnet berkarat;
    - (3) Kumparan gas ketnya terkikis.
  - b) Cara pemeliharaan :
    - (1) Bersihkan tiap hari dengan lap kering;
    - (2) Hidupkan motornya dengan menyambung listrik selama 5 (lima) menit tiap hari.
- 5) Barang Elektronik
  - a) Tanda-tanda kerusakan antara lain :
    - (1) Kabel terkelupas;
    - (2) Tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
  - b) Cara pemeliharaannya :
    - (1) Ditempatkan pada suhu yang sejuk;
    - (2) Tidak terkena sinar matahari langsung.
- 6) Hewan

- a) Tanda-tanda sakit :
  - (1) Tidak mau makan;
  - (2) Tidak bergairah dan tidur terus.
- b) Cara pemeliharaan :
  - (1) Memberi makan secara teratur;
  - (2) Secara berkala dilakukan pemeriksaan kesehatan;
  - (3) Menjaga kebersihan kandang.

d. Lain-lain

Selama basan baran berada di RUPBASAN, apabila terjadi :

1. Kerusakan atau penyusutan yang disebabkan oleh pengaruh alam, harus segera dilaksanakan pemeriksaan dan penelitian ulang dan dibuat berita acara sesuai model BA.3
2. Kecurian, kebakaran atau banjir harus segera diadakan pemeriksaan dan dibuat berita acara sesuai model BA.4

Kejadian-kejadian pada butir 1 dan 2 diatas dilaporkan kepada instansi yang berkaitan sesuai model Srt.2 dan Srt.3 dilampiri dengan berita acaranya (model BA.3 dan BA.4).

6. Pemutasian

- a. Mutasi Administratif Basan Baran dalam proses peradilan dicatat dengan perubahan tingkat pemeriksaan :
  - 1) Basan Baran yang dipinjam oleh penyidik atau penuntut umum untuk keperluan dalam proses peradilan dicatat dalam Buku model RBM.3.
  - 2) Basan Baran yang penyimpanannya dikuasakan pada instansi lain dicatat dalam Buku mutasi model RBM.4.
  - 3) Basan Baran yang perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat dalam Buku model RBM.5.
- b. Mutasi Fisik

- 1) Kegiatan mutasi fisik untuk Basan yang digunakan keperluan proses peradilan berdasarkan surat permintaan atau peminjaman dari instansi yang berwenang (penyidik, penuntut umum, pengadilan).
- 2) Setiap mutasi yang dimaksud butir 1) harus dibuatkan berita acara peminjaman model BA.7.

7. Pengeluaran/Penghapusan, Pemusnahan

a. Pengeluaran Basan Sebelum Adanya Putusan Pengadilan (Pra-Adjudication)

Petugas pengeluaran harus melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-surat :

- 1) Dalam hal perkara dihentikan karena tidak cukup bukti diperlukan adanya :
  - a) Surat pernyataan dari instansi yang berwenang;
  - b) Surat pengantar;
  - c) Surat perintah;
  - d) Berita acara pelaksanaan;
  - e) Berita acara pengeluaran Basan model BA.7.
- 2) Dalam hal perkara belum merupakan suatu tindak pidana diperlukan adanya :
  - a) Surat permintaan dari penyidik, penuntut umum;
  - b) Surat penetapan pengadilan;
  - c) Membuat berita acara penyerahan Basan model BA.7;
  - d) Berita acara pelaksanaan.
- 3) Dalam hal perkara dihentikan untuk kepentingan umum diperlukan adanya :
  - a) Surat perintah/permintaan dari Kejaksaan agung;
  - b) Berita acara penyerahan model BA.7.
- 4) Dalam hal tindakan jual lelang wajib diperhatikan :

- a) Pelaksanaan lelang atas persetujuan terdakwa atas kuasanya;
  - b) Berita acara pelaksanaan lelang;
  - c) Hasil lelang berupa uang dan sebagian kecil dari Basan dibuktikan dan disimpan di RUPBASAN.
  - d) Membuat berita acara penyerahan barang bukti, Model BA.7.
- 5) Dalam pengeluaran Basan atas permintaan pejabat yang berwenang secara yuridis untuk pinjam pakai diperlukan adanya :
- a) Surat permintaan dari instansi yang berwenang;
  - b) Surat penetapan pengadilan;
  - c) Berita acara pelaksanaan;
  - d) Surat perintah penyitaan;
  - e) Berita acara penyitaan;
  - f) Surat izin penyitaan;
  - g) Membuat berita acara penyerahan Basan model BA.7 yang ditandatangani oleh dua orang petugas RUPBASAN yaitu satu orang petugas pengeluaran, satu orang petugas pengamanan.
- b. Pengeluaran Basan Baran Setelah Adanya Putusan Pengadilan
- Hal-hal yang harus diperhatikan petugas RUPBASAN :
- 1) Basan Baran dikembalikan kepada yang berhak :
    - a) Surat permintaan dari instansi yang berwenang;
    - b) Surat penetapan/putusan pengadilan;
    - c) Berita acara pelaksanaan;
    - d) Berita acara pengeluaran setelah adanya putusan model BA.9;
    - e) Mencoret buku register dan ditandatangani oleh pejabat Rupbasan.
  - 2) Basan Baran dirampas oleh negara untuk dilelang, dimusnahkan, dirusak, diserahkan kepada instansi yang telah ditetapkan dan atau disimpan di RUPBASAN sebagai barang bukti dalam perkara lain, diperlukan :
    - a) Meneliti surat permintaan;

- b) Surat putusan pengadilan;
  - c) Berita acara pelaksanaan putusan;
  - d) Berita acara pengeluaran, model BA.10;
  - e) Penghapusan Basan Baran dari buku Register.
- 3) Basan Baran setelah proses penghapusan karena kerusakan, penyusutan, kebakaran, banjir, bencana alam, barang temuan dan barang bukti tidak diambil :
- a) Proses penghapusan Basan Baran :
    - (1) Mendata Basan Baran;
    - (2) Melaporkan dan mengusulkan penghapusan pada instansi yang berwenang dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  - b) Pelaksanaan pengeluaran atas dasar penghapusan :
    - (1) Surat perintah/persetujuan dari instansi terkait;
    - (2) Berita acara pelaksanaan;
    - (3) Berita acara pengeluaran, model BA.11;
    - (4) Penghapusan Basan Baran dari buku Register;
    - (5) Membuat laporan tentang pelaksanaan penghapusan Basan Baran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

## 8. Penyelamatan dan Pengamanan

Penyelenggaraan penyelamatan dan pengamanan Basan Baran di RUPBASAN adalah tanggung jawab Kepala RUPBASAN, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kesatuan Pengamanan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Tugas dan Kewajiban Regu Jaga :



- 1) Mengatur tugas semua anggota penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 2) Mengerjakan buku jaga, mencatat, pembagian tugas, inventaris, instruksi, kejadian-kejadian dan lain-lain hal yang dipandang perlu;
  - 3) Mengawasi penjagaan pos-pos keamanan;
  - 4) Mengawasi kebersihan, lampu-lampu dan sebagainya;
  - 5) Dalam terjadi gangguan baik dari dalam maupun dari luar, mengambil langkah-langkah pengamanan pertama dan segera melapor kepada Kepala RUPBASAN dan instansi lain yang berkepentingan;
  - 6) Segera melaporkan peristiwa yang bersifat khusus kepada Kepala RUPBASAN;
  - 7) Menerima dan memeriksa surat keluar masuk barang-barang dari atau ke RUPBASAN.
- b. Tugas dan Kewajiban Staf Penyelamatan dan Pengamanan :
- 1) Melaksanakan tata usaha pengamanan;
  - 2) Menyediakan dan menyalurkan sarana keamanan;
  - 3) Mencatat inventaris sarana keamanan serta cadangannya;
  - 4) Membantu melancarkan pelaksanaan tugas teknis pengamanan.
- c. Tugas Regu Jaga :
- 1) Tugas penjagaan dilaksanakan oleh regu-regu jaga secara bergilir menurut jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Penyelamatan dan Pengamanan.
  - 2) Tugas Penjagaan meliputi :
    - a) Menjaga keutuhan gedung kantor dan seluruh isinya baik selama maupun sesudah jam kantor;
    - b) Mengawasi kebersihan RUPBASAN.
  - 3) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tugas penjagaan adalah :
    - a) Petugas berpakaian seragam lengkap sesuai peraturan;

- b) Petugas dilengkapi dengan alat-alat pengamanan yang telah ditetapkan sesuai peraturan;
- c) Petugas Regu Jaga yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin Kepala Regu Jaga;
- d) Petugas Regu Jaga harus datang selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum jam dinas;
- e) Perlu memperhatikan :
  - (1) Cuaca, iklim yang ada pada waktu tugas jaga;
  - (2) Ketentuan-ketentuan khusus yang telah diserahterimakan.
- 4) Dalam rangka penggantian regu jaga, diwajibkan untuk :
  - a) Mengadakan serah terima kelengkapan regu penjagaan dengan membuat Berita Acara Serah Terima dalam buku jaga;
  - b) Tidak meninggalkan RUPBASAN sebelum serah terima.
- 5) Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum membuat Berita Acara Serah Terima penjagaan adalah :
  - a) Regu jaga yang akan diganti bersama-sama Kepala Regu Jaga yang akan mengganti meneliti barang inventaris RUPBASAN yang dianggap penting;
  - b) Regu jaga pengganti supaya apel dan diatur pembagian tugas oleh Kepala Regu Jaga Pengganti;
  - c) Anggota Regu Jaga pengganti menuju ke Pos Utama dan Pos Penjagaan berikutnya untuk menggantikan tugas penjagaan;
  - d) Regu jaga yang diganti, sesudah apel dan melakukan serah terima penjagaan, dibubarkan untuk beristirahat.
- 6) Yang harus diserahterimakan :
  - a) Senjata api dan peluru yang disediakan untuk penjagaan;
  - b) Kunci-kunci dan gembok-gembok;
  - c) Lampu senter, alat pemadam kebakaran, tangga, tali dan sebagainya;

- d) Instruksi-instruksi dari Kepala, dan lain-lain hal yang perlu mendapat perhatian khusus.
- d. Tugas dan Kewajiban Petugas Pintu Gerbang :
  - 1) Membuka/menutup pintu gerbang;
  - 2) Bertanggung jawab atas kunci pintu gerbang;
  - 3) Mengenali setiap orang, baik tamu maupun petugas yang keluar masuk RUPBASAN;
  - 4) Menerima petugas yang mengantarkan Basan Baran, kemudian mengantarkan kepada petugas penerima;
  - 5) Memeriksa muatan dan isi setiap kendaraan, gerobak yang keluar masuk RUPBASAN.
- e. Pos-pos Penjagaan :
  - 1) Pada tiap RUPBASAN diadakan :
    - a) Pos Utama yaitu kedudukan Kepala Regu Jaga;
    - b) Pos-pos pintu yaitu tempat-tempat penjagaan dipintu gerbang, pintu yang menghubungkan langsung dengan luar ruangan di dalam RUPBASAN sendiri;
    - c) Pos dalam, yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada dalam RUPBASAN.
  - 2) Penentuan pos-pos penjagaan ditetapkan oleh Kepala RUPBASAN.
  - 3) Penempatan pos-pos berdasarkan sistem pos berantai yaitu pos-pos penjagaan harus bisa saling berhubungan dengan isyarat, lonceng, lampu senter, telepon dan sebagainya.
  - 4) Giliran petugas dipos-pos penjagaan ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- f. Perlengkapan Pos-pos Penjagaan :
  - 1) Pos Utama perlu dilengkapi dengan :
    - a) Buku Jaga;
    - b) Buku catatan inventaris;

- c) Pesawat telepon;
  - d) Daftar alamat dan nomor telepon pejabat/instansi-instansi yang penting, antara lain :
    - (1) Kepala RUPBASAN
    - (2) Kepolisian
    - (3) Kejaksaan
    - (4) Pengadilan
    - (5) Pemadam kebakaran
  - e) Alat-alat pemadam kebakaran (tabung pemadam kebakaran, karung, pasir, galah dan sebagainya);
  - f) Lonceng untuk isyarat;
  - g) Jam;
  - h) Jam kontrol;
  - i) Denah RUPBASAN;
  - j) Senjata/peluru cadangan;
  - k) Lampu cadangan;
  - l) Kunci/gembok;
  - m) Lampu senter;
  - n) Almari senjata;
  - o) Alarm sistim.
- 2) Pos lingkungan dilengkapi dengan :
- a) Buku Jaga;
  - b) Buku catatan inventaris
  - c) Lonceng untuk isyarat;
  - d) Lampu senter;
  - e) Alat pemadam kebakaran.

## 9. Pelaporan

- a. Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan Basan Baran diperlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat semua kegiatan dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan berupa :
  - 1) Laporan rekapitulasi dari semua kegiatan administrasi pengelolaan Basan Baran;
  - 2) Laporan tentang mutasi Basan Baran selain ditujukan kepada atasan, tembusannya dikirim kepada instansi-instansi yang terkait.
- b. Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, segera dilaporkan akurat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi yang berkepentingan.
- c. Basan Baran yang dikelola oleh Cabang RUPBASAN secara berkala dilaporkan kepada Ka. RUPBASAN yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM yang tembusannya ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

#### 10. Pembahasan

Secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), kecuali memang belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan atau benda sitaan dan atau barang rampasan tidak mungkin disimpan dalam Rupbasan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, digedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, Rupbasan

Surakarta belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh instansi hukum terkait, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rupbasan Surakarta menerapkan prosedur/mekanisme penyimpanan benda sitaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara, diharapkan instansi terkait mau melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena selama ini masih saja instansi hukum terkait tidak melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh konkrit seperti yang dikemukakan oleh Kepala Rupbasan, bahwa dalam pemutasian peminjaman benda sitaan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan, maka apabila telah selesai seharusnya benda sitaan tersebut dikembalikan ke Rupbasan untuk disimpan kembali, namun realitanya benda sitaan tersebut tidak dikembalikan tanpa adanya pertanggung jawaban dari instansi yang berwenang meminjam benda sitaan negara tersebut.

**B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta dan Upaya Penyelesaiannya**

**1. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, memang belum begitu dikenal oleh masyarakat namun keberadaan Rupbasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari Lembaga Penyitaan yang merupakan bagian terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Karena Rupbasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita/dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, diharuskan mendukung kelancaran sistem pemasyarakatan maupun pembangunan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini terkait dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang seringkali membuat Rupbasan sendiri ikut terlibat didalamnya, sehingga menjadi tantangan yang kompleks dikarenakan posisi Rupbasan yang dapat dikatakan masih baru keberadaannya khususnya di wilayah Surakarta.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Rupbasan Surakarta masih mengalami kendala-kendala. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis terhadap Kepala Rupbasan Surakarta, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam

pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai berikut :

#### 1. Kendala Intern

Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul di dalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
  - Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan (pejabat/petugas) Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri.
  - Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan yang ada sekarang baru 19 orang, sementara yang dibutuhkan adalah 48 orang.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.
  - Gedung atau bangunan yang belum memenuhi syarat.  
Luas bangunan Rupbasan hanya sekitar 40-50 M<sup>2</sup> . Sedangkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 hektare.
  - Anggaran pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan masih sangat terbatas (belum maksimal).

#### 2. Kendala Ekstern



Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Surakarta dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.

Sebagai contoh konkritnya adalah mengenai uang hasil korupsi yang seharusnya disimpan di Rupbasan tetapi realitanya uang hasil korupsi disimpan di instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.

- b. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

## **2. Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut**

Dalam melaksanakan tugasnya, Rupbasan Surakarta masih mengalami kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern. Kendala-kendala yang muncul merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan, maka kendala tersebut harus segera diatasi secara tepat, agar peranan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 19 orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan Surakarta membutuhkan 48 orang. Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan bantuan personil.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

Luas tanah/bangunan gedung Rupbasan Surakarta memang masih mengalami keterbatasan, masih jauh dari ideal. Dalam keterbatasan tersebut untuk menjalankan kegiatannya seharusnya diperlukan tanah/bangunan yang luasnya adalah 10.577 M<sup>2</sup>, sementara bangunan Rupbasan Surakarta luasnya kurang lebih hanya 800 M<sup>2</sup>. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kota Surakarta agar mengusahakan tanah secara representatif.

Mengenai keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakimann untuk penambahan anggaran.

- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Surakarta dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.

Rupbasan Surakarta terhitung masih baru karena didirikan pada tahun 2003 sehingga aparat-aparat penegak hukum menganggap Rupbasan belum mampu menyimpan benda sitaan secara profesional. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambilalihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya

harus diserahkan pengelolaannya kepada Rupbasan. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.

- d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut dan terkadang benda sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban. Sering benda sitaan/rampasan secara kuantitas maupun kualitas berkurang ketika persidangan perkara tersebut telah selesai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan Surakarta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi terkait melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai peranan Rupbasan, selain itu pihak Rupbasan juga mengadakan MOU dengan Poltabes.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Surakarta meliputi sejak sebuah barang masuk ke dalam Rupbasan yaitu pertama, ketika sebuah barang diterima Rupbasan, barang tersebut akan dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian basan dan baran. Tahap ini berkisar pada kegiatan pemeriksaan, menguji dan menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan. Setelah melalui proses administrasi, basan dan baran akan dipelihara dan dimutasikan ke Rupbasan. Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya terjamin. Pada aspek pemeliharaan tidak terlepas dari pengamanan dan penyelamatan basan dan baran. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan atau Baran baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan Basan atau Baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Tahap terakhir adalah pengeluaran dan penghapusan. Tahap ini dilakukan baik sebelum adanya putusan pengadilan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya di Rupbasan Surakarta meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
  - b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.
  - c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Surakarta dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.
  - d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 19 orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan Surakarta membutuhkan 48 orang. Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan bantuan personil

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang, Kepala Rupbasan sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kota Surakarta agar mengusahakan tanah secara representatif.

Mengenai keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakimann untuk penambahan anggaran.

- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Surakarta dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.

Rupbasan Surakarta terhitung masih baru karena didirikan pada tahun 2003 sehingga aparat-aparat penegak hukum menganggap Rupbasan belum mampu menyimpan benda sitaan secara profesional. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.

- d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut dan terkadang benda sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan Surakarta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi terkait melalui penyuluhan-penyuluhan

mengenai peranan Rupbasan, selain itu pihak Rupbasan juga mengadakan MOU dengan Poltabes.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Nopember 2002, maka pihak-pihak yang terkait diharapkan melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, juga kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Surakarta, mengenai peranan dan arti penting Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
3. Meningkatkan dan menjalin kerja sama yang baik antara Rupbasan dengan instansi terkait dalam melaksanakan penyimpanan benda sitaan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.
4. Menumbuhkan sikap percaya dan menghargai dari pihak instansi penegak hukum mengenai keberadaan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, yang dapat menjalankan fungsinya secara profesional.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dari pihak Rupbasan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

6. Melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu dan memadai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton.M.Moeliono. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Perusahaan Umum Balai Pustaka.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Burhan Ashofa. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoko Prakoso. 1998. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Pusat Penelitian Surakarta.
- Hendrat Puryanto. 2004. *Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Indonesia*. Surakarta: Krakatau Surakarta.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna Nurul Afiah.1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

